

PERDA APBD TA 2025 - DPRD DORONG BUMD Proaktif Program Makan Siang Gratis

PENGASIH (KR) - Penerimaan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kabupaten Kulonprogo memberikan beberapa saran dan rekomendasi. APBD TA 2025 Kulonprogo, Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,729 Triliun.

"DPRD Kulonprogo mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) proaktif ikut serta dalam program makan siang gratis, sehingga bisa meringankan beban APBD dan menambah kemampuan keuangan daerah," kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kulonprogo Dra Keksi Wuryaningih saat menyampaikan pendapat akhir dalam Penandatanganan Keputusan Bersama terhadap Raperda tentang APBD TA 2025.

Selasa siang (26/11), di Ruang Kresna DPRD setempat, Rapur dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj Bupati, Sekda dan jajarannya.

DPRD juga menyoroti terkait pengentasan kemiskinan di Kulonprogo sampai saat ini juga belum signifikan. Karena itu DPRD minta pemerintah daerah perlu merumuskan program khusus yang lebih jelas untuk mencapai target sesuai instruksi presiden. "Program penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan dengan sinergi semua bidang melalui dinas terkait dan ada inovasi program terutama di daerah kemiskinan ekstrim."



KR-Widiastuti

Pelaksanaan Rapur APBD TA 2025.

kata Keksi.

Pemerintah daerah, lanjut Keksi, diminta pula komitmennya dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik harus dilakukan evaluasi berkala untuk optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja. Demikian juga peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan daerah harus fokus pada kegiatan yang berdampak besar terhadap optimalisasi anggaran yang berinovasi dan teknologi, penguatan regulasi dan kebijakan.

"Perlu dipertegas pula peningkatan dan pemerataan mutu layanan kesehatan terutama di daerah perbukitan atau pegunungan dengan kondisi geografis yang sulit, terutama di Puskesmas Samigaluh I diharuskan ada Dokter Jaga 24 jam dan menempati Rumah Dinas yang telah disediakan," tandas Keksi sambil menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur terutama yang proses pengadaannya dengan sistem lelang agar dilaksana-

kan segera setelah APBD ditetapkan, dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA dalam penyampaian pendapat akhir menyatakan menyepakati beberapa hal, antara lain, penganggaran program Makan Bergizi sehat sebesar Rp 29,5 Miliar, sebesar Rp 14,4 Miliar dituang dalam BTT dan sebesar Rp 15,1 Miliar dipotongkan dari belanja SKPD yang akan disesuaikan pada tahap evaluasi Gubernur terhadap RAPBD Tahun 2025.

"Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah karena adanya opsen MBLB sebesar 751,39 juta rupiah. Penundaan penganggaran penyertaan modal pada BPD DIY sebesar Rp 7,5 Miliar dan Perumda Bank Kulonprogo sebesar Rp 5 Miliar, adanya tambahan belanja pada SKPD, serta penguatan Silpa RSUD Wates sebesar Rp 7 Miliar dan menambah Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 6,9 Miliar," urai Siwi.

(Wid)